

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KINERJA KEUANGAN
DAERAH TERHADAP KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI
ACEH DAN BENGKULU**



**SKRIPSI OLEH:
ZULFA WULANDARI
01021281823183**

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

2025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Dan Bengkulu**

Disusun Oleh:

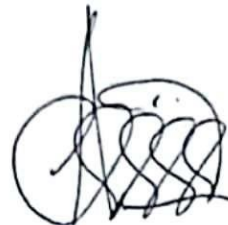
Nama : Zulfa Wulandari
NIM : 01021281823183
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif:

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal: 17 April 2025



**Dr. M. Subardin, S.E., M.Si
NIP. 197110302006041001**

LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KINERJA KEUANGAN
DAERAH TERHADAP KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI
ACEH DAN BENGKULU

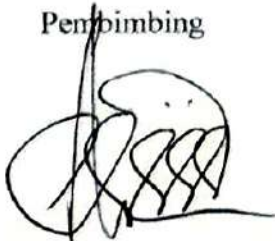
Disusun oleh:

Nama : Zulfa Wulandari
Nim : 01021281823183
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 06 Mei 2025 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 04 Juli 2025

Pembimbing



Dr. M. Subardin, S.E., M.Si
NIP. 197110302006041001

Penguji



Imelda, S.E., M.S.E.
NIP. 197703092009122002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

ASLI

JUR. EK. PEMBANGUNAN 10-7-2025
FAKULTAS EKONOMI UNSRI



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulfa Wulandari
NIM : 01021281823183
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang kajian / konsentrasi : Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dan Bengkulu.”

Dosen Pembimbing : Dr. M. Subardin, S.E, M.Si

Tanggal Uji : 06 Mei 2025

Adalah benar- benar hasil karya ilmiah saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Palembang, 04 Juli 2025

Pembuat Pernyataan



Zulfa Wulandari

NIM: 01021281823183

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dan Bengkulu**” sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari berbagai kendala. Berkat bantuan, do’a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih tidak henti-hentinya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dukungan dalam bentuk materil maupun moril dari orang-orang tercinta yang menguatkan tekad saya untuk menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

Saya sebagai penulis tentunya tidak terlepas dari segala macam kekurangan, baik keterbatasan ilmu maupun kemampuan, sehingga saya sadar secara penuh bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Dengan demikian saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sehingga dapat dijadikan acuan agar bisa menjadi lebih baik lagi dimasa mendatang. Saya juga berharap agar penulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk perkembanagn dan peningkatan wawasan ilmu pengetahuan.

Palembang, 04 Juli 2025



Zulfa Wulandari

(01021281823183)

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini berlangsung, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik berupa dukungan, dorongan, bimbingan, kritik dan saran, serta ilmu pengetahuan. Penulis ingin menyampaikan banyak rasa terimakasih atas segala bentuk dukungan yang sudah diberikan, kepada :

1. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tuhan dari semesta alam tempat saya memanjatkan do'a dan bergantung, yang karena-Nya semua rintangan diberikan jalan penyelesaian sehingga skripsi ini bisa selesai.
2. Kepada Bapak Jemingan selaku ayahanda, Ibu Marina selaku ibunda, Ibu Susi Yanti sebagai mami, adik-adik, seluruh bibi dan paman yang selalu memberikan motivasi, semangat, akomodasi serta do'a yang tidak pernah berhenti ketika sedang melakukan perkuliahan dan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. M. Subardin, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Imelda, S.E., M.S.E selaku dosen penguji skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi saya.
5. Bapak Dr. Imam Asngari, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan pengarahan terhadap proses pembelajaran akademik saya agar berjalan dengan baik.
6. Ibu Sri Andaiyani, S.E selaku dosen yang dengan senang hati memberikan kesempatan, dukungan dan bimbingan untuk mengikuti berbagai kegiatan positif selama perkuliahan berlangsung sehingga bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman baru yang berharga.
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan memberi kemudahan selama proses belajar mengajar masa kuliah maupun selama penulisan skripsi.
8. Sinta, Syifa, Rara, Hanum, Yuli, Qila, Lala, Indah, Rani, Fanny, Shinta, Hani, Milen, Melinda, Riyadhhi, Wihan, Arifin, Syahid dan semua teman dekat saya yang sudah memberikan dukungan moral selama kegiatan perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.

9. Ka Tama, Ka Aisyah, dan Ka Diki atas dukungan, motivasi dan arahan sebagai kakak tingkat yang selalu mengajak kepada kegiatan positif selama perkuliahan berlangsung.
10. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan, khususnya Angkatan 2018 yang telah memberikan semangat kepada penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
11. Seluruh pihak yang berpengaruh dalam proses pembuatan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan kepada kita semua, *Aamiin*.

Palembang, 04 Juli 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Zulfa' followed by a stylized 'W' and 'a'.

Zulfa Wulandari
(01021281823183)

ABSTRAK

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH DAN BENGKULU

Oleh:

Zulfa Wulandari; Muhammad Subardin

Penelitian analisis komparasi (perbandingan) kemandirian daerah dengan rasio PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total pendapatan daerah yang disebut Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), pertumbuhan ekonomi dan rasio aktivitas belanja daerah yang didapat dari perbandingan belanja operasional dengan total belanja daerah. Metode penelitian ini adalah estimasi regresi data panel dengan hasil model terbaik yaitu REM (*Random Effect Model*) tahun 2016-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel derajat desentralisasi fiskal memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan dan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh dan Bengkulu. Variabel rasio aktivitas belanja daerah tidak berpengaruh signifikan di Provinsi Bengkulu terhadap kemiskinan, sebaliknya pengaruhnya adalah signifikan negatif di Provinsi Aceh.

Kata kunci: *Kemiskinan, Derajat Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Operasional Daerah*

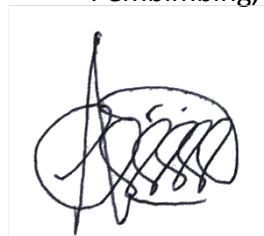
Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis. S.E., M.Si
(NIP: 19730406201011001)

Pembimbing,



Dr. M. Subardin, S.E., M.Si.
(NIP: 197110302006041001)

ABSTRACT

THE EFFECT OF ECONOMIC GROWTH AND REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE ON POVERTY IN DISTRICTS/CITIES OF ACEH AND BENGKULU PROVINCES

By:

Zulfa Wulandari; Muhammad Subardin

Comparative analysis about ratio of PAD (Regional Original Income) to total regional income called the Degree of Fiscal Decentralization (DDF), economic growth and the ratio of regional spending activities obtained from the comparison of operational spending with total regional spending. This research method is panel data regression estimation with the best model results, namely REM (Random Effect Model) in 2016-2023. The results of the study show that the variable degree of fiscal decentralization has an insignificant effect on poverty and the variable economic growth has a significant and positive effect on poverty in Aceh and Bengkulu Provinces. The variable ratio of regional spending activities does not have a significant effect in Bengkulu Province on poverty, on the contrary its effect is significantly negative in Aceh Province.

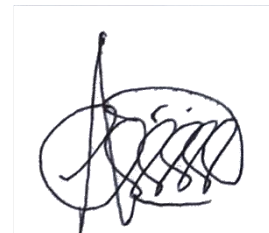
Keywords: *Poverty, Degree of Fiscal Decentralization, Economic Growth, Regional Operational Spending*

Acknowledge by,
Head of Development Economics Department,



Dr. Mukhlis. S.E, M.Si
(NIP:19730406201011001)

Advisor,



Dr. M. Subardin, S.E, M.Si.
(NIP:197110302006041001)

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa :

Nama : Zulfa Wulandari

NIM : 01021281823183

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Mata Kuliah : Keuangan Daerah

Judul : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Daerah
Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dan
Bengkulu

Telah kami periksa cara penulisan, grammar, maupun susunan tensesnya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Pembimbing,



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si.
(NIP: 19730406201011001)



Dr. M. Subardin, S.E., M.Si
(NIP: 197110302006041001)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Zulfa Wulandari
	NIM	01021281823183
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Tempat, Tanggal Lahir	Bekasi , 14 Mei 2000
	Alamat	Jalan Padat Karya, Sua Akbar I Blo.B7, Kel. Talang Jambe Kota Palembang, Sumatera Selatan
Agama	Islam	
Status	Belum Menikah	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Email	zulfawulandari513@gmail.com	
Nomor HP	0895370651672	
PENDIDIKAN FORMAL		
2006 - 2012	SDN Duren Jaya VI Kota Bekasi	
2012 - 2015	SMPN 3 Kota Bekasi	
2015 - 2018	SMAN 2 Kota Bekasi	
2018 - 2025	S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya	
PENGALAMAN ORGANISASI		
2018 - 2020	Staff Muda Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi	
2018 - 2022	Staff Komunitas Edukasi Ilmiah Ekonomi (KEIMI)	
2018 - 2022	Staff UKM Unsri Mengajar	
2018 - 2021	Wakil Presiden Geulis	
2020 - 2021	Anggota pengurus Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA)	

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
ABSTRAK.....	vii
ASBTRACT.....	viii
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Kemiskinan.....	12
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Kuznet.....	15
2.1.3 Keuangan Daerah	17
2.2 Konsep dan Definisi	23
2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	23
2.2.2 Pendapatan Daerah	25
2.2.3 Belanja Operasional Daerah	26
2.2.4 Belanja Daerah.....	27
2.3 Penelitian Terdahulu.....	28

2.4	Kerangka Pemikiran	35
3	Hipotesis Penelitian.....	35
2.5	Hipotesis Penelitian.....	36
BAB III		37
METODOLOGI PENELITIAN.....		37
3.1	Ruang Lingkup Penelitian	37
3.2	Jenis dan Sumber Data	37
3.2.1	Jenis Data.....	37
3.2.2	Sumber Data	37
3.2.3	Data Berdasarkan Waktu	38
3.3	Metode Pengumpulan Data	39
3.4	Teknik Analisis.....	39
3.4.1	Estimasi Model Regresi Data Panel.....	39
3.4.2	Penentuan Model Estimasi Regresi Data Panel	40
3.5	Uji Signifikansi.....	42
3.5.1	Uji F	42
3.5.2	Uji t	43
3.6	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	43
3.6.1	Variabel Dependen	44
3.6.2	Variabel Independen	44
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1	Gambaran Umum	47
4.1.1	Gambaran Umum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.....	47
4.1.2	Gambaran Umum Provinsi Bengkulu	49
4.1.3	Persamaan Kondisi Wilayah dan Tingkat Kemiskinan.....	51
4.1.4	Persamaan Desentralisasi Fiskal Provinsi Aceh dan Bengkulu	54
4.1.5	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh dan Bengkulu.....	59
4.2	Hasil Penelitian.....	61
4.2.1	Uji Estimasi Model Regresi Data Panel	61
4.2.2	Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel	62
4.2.3	Hasil Estimasi Regresi	64
4.2.4	Uji Signifikansi (Uji F dan Uji t).....	69
4.3	Pembahasan	71

4.3.1	Analisis Perbandingan (Komparasi) Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan	71
4.3.2	Analisis Perbandingan (Komparasi) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan	73
4.3.3	Analisis Perbandingan (Komparasi) Pengaruh Rasio Aktivitas Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		78
5.1	Kesimpulan.....	78
5.1	Saran	78
Daftar Pustaka		81
LAMPIRAN.....		88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Pulau Sumatera Menurut Provinsi per September Tahun 2016-2023	2
Tabel 1.2 Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Aceh Tahun 2016-2023	5
Tabel 1.3 Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2023	5
Tabel 1.4 Pertumbuhan Ekonomi ADHK Menurut Provinsi Tahun 2016-2023	8
Tabel 1.5 Rasio Aktivitas Belanja Operasional Daerah Provinsi Aceh Tahun 2016-2023	9
Tabel 1.6 Rasio Aktivitas Belanja Operasional Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2023	9
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal.....	21
Tabel 2.2 Kriteria Belanja Operasi.....	23
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	48
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu	50
Tabel 4.3 Presentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2023	52
Tabel 4.4 Presentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2023	53
Tabel 4.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh.....	54
Tabel 4.6 Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Aceh	57
Tabel 4.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu	58
Tabel 4.8 Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Bengkulu.....	58
Tabel 4.9 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh.....	59
Tabel 4.10 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu.....	60
Tabel 4.11 Fixed Effect Model (FEM) Provinsi Aceh dan Bengkulu	61
Tabel 4.12 Common Effect Model (CEM) Provinsi Aceh dan Bengkulu	62
Tabel 4.13 Random Effect Model (REM) Provinsi Aceh dan Bengkulu	62
Tabel 4.14 Hasil Uji Chow Provinsi Aceh dan Bengkulu	62
Tabel 4.15 Hasil Uji Hausman Provinsi Aceh dan Bengkulu	63
Tabel 4.16 Hasil Uji Lagrange Multiplier Provinsi Aceh dan Bengkulu.....	64
Tabel 4.17 Tabel Hasil Regresi Provinsi Bengkulu	64
Tabel 4.18 Koefisien Intersep Provinsi Bengkulu	66
Tabel 4.19 Tabel Hasil Regresi Provinsi Aceh	67
Tabel 4.20 Koefisien Intersep Provinsi Aceh	68
Tabel 4.21 Hasil Uji Signifikansi Provinsi Aceh	69
Tabel 4.22 Hasil Uji Signifikansi Provinsi Bengkulu.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan	13
Gambar 2.2 Kurva Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Menurut Kuznet	17
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	35
Gambar 4.1 Peta Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.....	47
Gambar 4.2 Peta Provinsi Bengkulu	49

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Hasil Uji Chow Provinsi Bengkulu Dan Aceh.....	88
2.	Hasil Uji Hausman Provinsi Bengkulu Dan Aceh	88
3.	Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM) Provinsi Bengkulu Dan Aceh	89
4.	Hasil Uji CEM (Common Effect Model) Provinsi Bengkulu Dan Aceh...	90
5.	Hasil Uji Fixed Effect Model (FEM) Provinsi Bengkulu Dan Aceh	90
6.	Hasil Uji Random Effect Model (REM) Provinsi Bengkulu Dan Aceh.....	91
7.	Hasil Regresi Pool Data Panel Provinsi Bengkulu	913
8.	Hasil Regresi Pool Data Panel Provinsi Aceh	93
9.	Hasil Uji Signifikansi Provinsi Bengkulu	95
10.	Hasil Uji Signifikansi Provinsi Aceh	95
11.	Tabel Data Provinsi Bengkulu	96
12.	Tabel Data Provinsi Aceh.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, persoalan besar seperti kemiskinan belum berhasil ditangani dengan baik di negara yang kaya akan keanekaragaman Sumber Daya Alamnya (SDA). Pada dasarnya setiap negara pasti pernah melewati fase miskin, namun untuk negara berkembang seperti Indonesia tentunya permasalahan kemiskinan yang tak kunjung teratasi menjadi “pekerjaan rumah” yang berat (Pratama, 2014). Rantai permasalahan Indonesia yang tak kunjung usai ditangani ini tidak jauh disebabkan oleh faktor tidak terolahnya kekayaan alam yang kita miliki dengan baik. Hal ini biasa disebut sebagai anomali pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), artinya daerah kaya SDA tetapi miskin (Zaini, 2024). Hal ini terjadi bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor sosial, struktural, dan kondisi alam.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 tercatat mencapai 25,90 juta jiwa. Pulau Sumatera berada di peringkat kedua, pulau dengan persentase penyumbang penduduk miskin terbanyak di Indonesia setelah Pulau Sulawesi tahun 2023. Setelah dipelajari, Provinsi Aceh berada di peringkat teratas jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera lalu disusul oleh Provinsi Bengkulu di peringkat kedua, seperti yang bisa dilihat pada Tabel 1.1. Padahal pemerintah daerah Provinsi Aceh dan Bengkulu melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mengklaim termasuk yang memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan yang cukup banyak.

**Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Pulau Sumatera Menurut Provinsi
per September Tahun 2016-2023**

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (%)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	16,43	15,92	15,68	15,01	15,43	15,53	14,75	14,45
Sumatera	10,27						8,33	8,15
Utara		9,28	8,94	8,63	9,14	8,49		
Sumatera	7,14						6,04	5,95
Barat		6,75	6,55	6,29	6,56	6,04		
Riau	7,67	7,41	7,21	6,90	7,04	7	6,84	6,68
Jambi	8,37	7,90	7,85	7,51	7,97	7,67	7,77	7,58
Sumatera	13,39						11,95	11,78
Selatan		13,10	12,82	12,56	12,98	12,79		
Bengkulu	17,03	15,59	15,41	14,91	15,30	14,43	14,34	14,04
Lampung	13,86	13,04	13,01	12,30	12,76	11,67	11,44	11,11
Kepulauan	5,04						4,61	4,52
Bangka								
Belitung		5,30	4,77	4,50	4,89	4,67		
Kepulauan	5,84						6,03	5,69
Riau		6,13	5,83	5,80	6,13	5,75		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), *diolah*

Belum lagi, Negara Indonesia pada tahun 2023 yang jumlah penduduknya kurang lebih ada 278,8 juta jiwa dan tersebar di 38 provinsi dalam 17.374 pulau menjadi penghambat pemerataan yang dimasifkan oleh pemerintah pusat. Terdapat perbedaan potensi, kekayaan dan karakteristik daerah yang dapat dikembangkan. Keadaan geografis inilah yang menjadi alasan berlangsungnya kepemimpinan yang bersifat sentralistik dianggap gagal karena hanya fokus pembangunan kedalam (daerah) dan melupakan pembangunan keluar (global), dimana kebijakan terhadap otonomi adalah latar belakang pemicunya. Kenyataannya yang mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan daerah tersebut adalah pemerintah daerah

yang keberadaannya langsung dekat di tengah masyarakat. Sistem pemerintahan Indonesia berubah dari sentralisasi ke desentralisasi dengan otonomi daerah. Tujuan lain kebijakan ini adalah taraf kesejahteraan yang meningkat (Wahyuni, 2018).

Hingga akhirnya tahun 1998, kebijakan otonomi daerah mulai berlaku hingga saat ini krisis perekonomian dan lainnya tidak terjadi lagi. Tercantum dalam UUD 1945, hak otonom yang istimewa dijamin oleh pemerintah. Pokok utama meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu terlaksananya otonomi daerah, itulah sebabnya pemerintah daerah berwenang membuat program dengan mempertimbangkan potensi dan ciri khas masing-masing daerah kekuasaannya. Pemerintah daerah harus manusia yang berjiwa inovatif dan inisiatif untuk memaksimalkan pengelolaan kekayaan daerah sebagai modal otonomi daerah untuk pembangunan dan pertumbuhan (Wahyuni, S. 2018).

Penerapan desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan didapatkan bahwa besaran dana transfer yang dialokasikan memiliki hubungan yang positif. Semakin besar dana transfer daerah maka semakin mendorong pendapatan perkapita sehingga mampu menekan angka kemiskinan. Kebutuhan masyarakat lokal menjadi tujuan utama pemerintah daerah mengalokasikan dana transfer untuk membuat kebijakan baru di masa mendatang yang lebih sesuai dan terarah serta memiliki tolak ukur keberhasilan yang jelas. Tentunya di setiap kebijakan akan ada faktor-faktor yang akan menghambat pelaksanaannya, tak terkecuali dalam hal menjamin perbaikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah dalam sistem

desentralisasi ini serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas maka harus diatasi (Zulyanto, 2020).

Indikator keberhasilan kebijakan desentralisasi fiskal di setiap daerah adalah rasio pendapatan dan pengeluaran daerah terhadap APBD. Tidak bergantungnya sumber pembiayaan pembangunan daerah dari pemerintah pusat menandakan daerah itu mandiri. Nilai DDF yang berkaitan erat dengan PAD dan pengaruh tiap indikator yang positif atau tidaknya. Karena berhasil atau tidaknya pelaksanaan desentralisasi di daerah tersebut dilihat dari aspek PAD nya (Zulyanto, 2020).

Halaskova (2016) mengemukakan bahwa program desentralisasi fiskal terbukti mampu mengembangkan potensi dan kreatifitas pemerintah daerah guna meningkatkan perolehan penerimaan dari hasil mengelola kekayaan daerah yang nantinya dapat digunakan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan mempengaruhi kualitas dan ruang lingkup pelayanan kepada masyarakat. Berjalannya kebijakan otonomi daerah belum mampu membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh dan Bengkulu meningkat alias rendah dan tidak berhasil menekan angka kemiskinan. Kenyataan bahwa sumber daya alam baik mineral maupun non mineral yang dimiliki berlimpah dan bahkan pada tahun 2009-2014 kewenangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ada pada bupati namun kemudian dialihkan kepada gubernur sampai tahun 2020 hingga akhirnya dikembalikan ke pusat oleh Kementerian ESDM dan Investasi hingga saat ini. Pada saat kewenangan masih dipegang oleh pemerintah daerah, kerusakan alam yang sudah banyak terjadi untuk diambil keuntungannya ternyata banyak

penyalahgunaan wewenang sehingga kerusakan terus terjadi namun sedikit penghasilan dan manfaat yang bisa dirasakan penduduknya. Potensi sumber daya alam yang dimiliki tetap berjalan pengolahannya dan berdampak pada kerusakan lingkungan namun tidak terserap keseluruhan manfaatnya oleh masyarakat (indikasi penyalahgunaan wewenang) (Priatna, 2025).

Tabel 1.2 Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Aceh Tahun 2016-2023

Derajat Desentralisasi Fiskal (%) Prov. Aceh								
Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PAD (M)	2060,18	2276,31	2359,39	2698,91	2570,78	2505,89	2917,15	384,73
TPD(M)	12364,56	14350,99	14427,78	15752,8	14439,92	13948,39	13713,6	799,55
DDF (%)	16,66	15,86	16,35	17,13	17,8	17,97	21,27	48,12

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, *diolah*

Tabel 1.3 Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2023

Derajat Desentralisasi Fiskal (%) Prov. Bengkulu								
Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PAD (M)	731,56	804,58	872,26	826,67	712,35	984,42	1088,42	136,47
TPD(M)	2355,56	2804,58	2851,81	2934,06	2786,93	3051,75	2953,74	380,70
DDF (%)	31,06	28,69	30,59	28,18	25,56	32,26	36,85	35,85

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, *diolah*

Tandanya kebijakan pemberian otonomi terhadap daerah perlu dikaji dan diawasi pelaksanaannya menggunakan analisis perhitungan kinerja keuangan daerah. Pendapatan daerah dilihat melalui PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang kemudian digunakan untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah atau Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Anjuran terhadap pembangunan daerah yaitu menyeimbangkan pusat perhatiannya terhadap hal yang menjadi penyebab

kemiskinan. Karena terjadinya perubahan tata kelola kebijakan desentralisasi berpengaruh terhadap keberadaan masyarakat miskin (Zulyanto, 2020).

Jika diamati lebih mendalam pada Tabel 1.2, derajat desentralisasi fiskal Provinsi Aceh berada pada skala 10,01%-20,00% (Kurang) dan 20,01%-30,00% (Sedang) hingga pada tahun 2023 berkembang pesat memasuki skala 40,01%-50,00% (Baik). Berbanding dengan Provinsi Bengkulu pada Tabel 1.2 ada pada skala 20,01%-30,00% (Sedang) dan 30,01%-40,00% (Cukup). Pada penelitian oleh Wulandari (2024), yang mengkaji hubungan antara Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) terhadap kemiskinan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Pada penelitian ini didapati rasio kemandirian keuangan daerah yang rendah karena Pendapatan Asli Daerah yang berhasil dikumpulkan rendah. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu wilayah bisa disebabkan oleh kurangnya kepekaan daerah dalam mengenali potensi asli daerah, rendahnya kesadaran wajib pajak, retribusi rendah, kualitas SDM aparatur yang rendah, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang rendah, belanja dan pengeluaran pemerintah yang rendah (Saragih, 2003).

Besarnya pendapatan berkaitan erat dan memiliki efek negatif terhadap keadaan ekonomi suatu negara karena jika pendapatan rendah yang disebabkan oleh minimnya kemampuan bekerja mengakibatkan sedikitnya kegiatan produksi atau pengelolaan sumber daya yang dimiliki karena rendahnya permintaan akan barang dan jasa (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018). Tidak adanya kegiatan produksi (bekerja) secara terus menerus selama periode tertentu karena rendahnya kualitas manusia maka mereka tidak akan memiliki pendapatan untuk kegiatan konsumsi,

daya beli Negara Indonesia pun akan berkurang dan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita menjadi rendah. Multi aspek yang bertumbuh dan berkembang sepesat mungkin adalah tujuan seluruh negara terkhusus negara berkembang seperti Indonesia. Salah satunya dalam aspek perekonomian yang dituntut adanya peningkatan setiap periode. Pertumbuhan ekonomi adalah fruktuasi ekonomi berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Belanja pembangunan untuk sarana dan prasarana umum dan perbaikan kualitas pelayanan proporsinya mempengaruhi pertumbuhan di bidang ekonomi (Saptomo, T. 2018).

Sejumlah negara menggunakan pertumbuhan ekonomi menjadi alat yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara (Kumalasari, 2011). Selain itu pertumbuhan ekonomi menggambarkan bagaimana Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi salah satu penentu besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menjadi alasan mengapa penelitian ini menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi ikut serta dianalisis untuk variabel independen yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Aceh dan Bengkulu.

Pada Tabel 1.4, 2016-2023 pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh dan Bengkulu tidak pernah berada di level paling rendah di Pulau Sumatera, kecuali pada tahun 2022 menjadi paling rendah di Pulau Sumatera dan Provinsi Bengkulu menjadi kedua terendah tingkat pertumbuhan ekonominya. Pada penelitian yang dikaji oleh Sari (2019), antara PDRB dan kemiskinan memiliki hubungan pengaruh yang positif dimana jika pendapatan meningkat kemiskinan juga meningkat. Menurutnya karena ada peralihan tahapan pembangunan awal yang lambat laun

secara konsisten akan menekan angka kemiskinan pada akhir pembangunan (maju). Kondisi ini juga sama terjadi di Provinsi Aceh dan Bengkulu yang menandakan pertumbuhan ekonomi yang menekan angka kemiskinan lambat terjadi.

Tabel 1.4 Pertumbuhan Ekonomi ADHK Menurut Provinsi Tahun 2016-2023

Provinsi	<u>Pertumbuhan Ekonomi ADHK Th Dasar 2010 (%)</u>							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nanggroe Aceh Darussalam	3,29	4,18	4,61	4,14	-0,37	2,79	4,21	4,2
Bengkulu	5,28	4,98	4,99	4,94	-0,02	3,24	4,31	4,3
Sumatera Utara	5,18	5,12	5,18	5,22	-1,07	2,61	4,73	5,01
Sumatera Barat	5,27	5,3	5,14	5,01	-1,62	3,29	4,36	4,62
Riau	2,18	2,66	2,35	2,81	-1,13	3,36	4,55	4,21
Jambi	4,37	4,6	4,69	4,35	-0,44	3,66	5,12	4,67
Sumatera Selatan	5,04	5,51	6,01	5,69	-0,11	3,58	5,23	5,08
Lampung	5,14	5,16	5,23	5,26	-1,67	2,79	4,28	4,55
Kepulauan Bangka Belitung	4,1	4,47	4,45	3,32	-2,3	5,05	4,40	4,38
Kepulauan Riau	4,98	1,98	4,47	4,83	-3,8	3,43	5,09	5,16

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), *diolah*

Selain pendapatan tentu ada pengeluaran, maka dari itu pemerintah daerah menggunakan pendapatan daerahnya untuk melakukan belanja daerah. Program kesejahteraan (*Welfare State*) oleh pemerintah yang dianggap berperan penting dalam kegiatan ekonomi sebagai bentuk campur tangan untuk menunjang kesejahteraan warganya, baik dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial lainnya (Safitri, Sugianto, & Triwahyuningtyas, 2022). Campur tangan pemerintah dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik seperti sarana dan prasarana kesehatan serta pendidikan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusianya.

Menurut (Ishak, 2017) belanja yang dilakukan pemerintah untuk mendukung pengurangan tingkat kemiskinan secara tidak langsung melalui suntikan pendapatan untuk mendorong kegiatan konsumsi yang menimbulkan peningkatan produksi dan belanja sarana dan prasarana yang mendorong investasi perlu dianalisis menggunakan rasio aktivitas belanja daerah, yang akan digunakan dalam penelitian kali ini. Melihat sebesar apa pengaruh pemerintah daerah Provinsi Aceh dan Bengkulu untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerahnya melalui belanja yang dianggarkan.

Tabel 1.5 Rasio Aktivitas Belanja Operasional Daerah Provinsi Aceh
Tahun 2016-2023

RABD (%) Prov. Aceh								
Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BOD (M)	9834,9	11664,56	9802,4	12625,8	11486,7	11484,3	12904,4	9678,8
TBD(M)	12119,7	13832,9	12306,3	15787,9	13242,2	13683,6	15773,1	11354,8
RABD (%)	0,8115	0,8433	0,7965	0,7997	0,8674	0,8393	0,8181	0,8524

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, *diolah*

Tabel 1.6 Rasio Aktivitas Belanja Operasional Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2016-2023

RABD (%) Prov. Bengkulu								
Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BOD (M)	1643,7	2157,7	2361,1	2376,5	2281,4	2537,9	2599,5	2536,5
TBD(M)	2029,7	2868,8	2979,6	3118,3	2698,5	2880,2	3016,5	3123,4
RABD (%)	0,8098	0,7521	0,7924	0,7621	0,8454	0,8811	0,8617	0,8121

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, *diolah*

Pada Tabel 1.5 dan 1.6 dapat dilihat bahwa belanja operasional daerah Provinsi Aceh lebih tinggi dibandingkan Bengkulu dari tahun 2016-2020

sedangkan di tahun 2021-2023 terjadi hal yang sebaliknya, sehingga rata-rata rasio belanja operasional daerah pun lebih besar di Provinsi Aceh. Berarti, Provinsi Aceh lebih memfokuskan belanja daerah untuk operasional guna melakukan pembangunan dan suntikan dana untuk meningkatkan pendapatan daerah. Belanja operasional yang tinggi dianggap mampu menstimulasi pendapatan daerah namun manfaatnya hanya bisa dirasakan hanya dalam jangka waktu yang singkat. Hal ini tetap dilakukan guna meningkatkan semangat melakukan produktivitas dan konsumsi. Bantuan dan subsidi yang diberikan mendorong pergeseran pola dan gaya hidup untuk menambah *income* (pemasukan) dari tradisional menjadi kreatif modern yang mengikuti perkembangan jaman (globalisasi). Anggaran yang dialokasikan untuk program-program sosial dan subsidi diharapkan dapat menjadi bantuan langsung terhadap pendapatan kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan oleh pemerintah daerah yang menjadi stimulasi konsumsi dan produksi daerah (Maharani, 2023).

Menurut penelitian Jannah, dkk (2024), belanja operasional daerah berpengaruh terhadap kemiskinan karena belanja daerah yang masif meningkatkan pembangunan dan memberikan subsidi pendapatan penduduk daerah dianggap mnumbuhkan perekonomian yang berefek pada menekan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang lambat berarti ada hubungan antara kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonominya terhadap kemiskinan. Kemiskinan yang tetap tinggi setelah usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja anggaran daerahnya berarti ada faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan itu sendiri yang melatarbelakanginya di Provinsi Aceh dan Bengkulu.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah penjabaran latar belakang penelitian di atas, persoalan yang harus dirumuskan, yaitu sebagai berikut: ‘Bagaimana Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Aktivitas Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dan Bengkulu?’

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengkomparasikan pengaruh variabel Desentralisasi Fiskal, Rasio Aktivitas Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dan Bengkulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan terdapat manfaat yang bisa didapat, seperti sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan koleksi referensi dan literatur dalam pemahaman dan pengembangan teori kemiskinan dan faktor yang mempengaruhinya serta konsep kebijakan otonomi daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk pemerintah terutama pemerintah daerah terkait dalam optimalisasi perumusan otonomi daerah dengan maksimalisasi kebijakan otonomi daerah yang dipilih untuk mengelola potensi yang dimiliki demi mengatasi kemiskinan

Daftar Pustaka

- Amri, K. (2022). Pengaruh Belanja Pemerintah Dan Kredit Umkm Terhadap Tingkat Kemiskinan: Peran Pengangguran Sebagai Pemoderasi (Studi Komperatif Antar Wilayah Administratif Di Provinsi Sumatera Utara).
- Andriyani, D. (2015). Ekonomi Sumber Daya Manusia. Ekonomi.
- Alfiah, Maryam Nurhilma dan Bashir, Abdul (2024) Analisis Pengaruh Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2005-2021. *Undergraduate thesis*, Sriwijaya University.
- Arsyad, Lincolin. (2020). Ekonomi Pembangunan Edisi Ke-5. Yogyakarta: UPP STIE YKPM.
- ArcGIS. (2025). Peta Kota Provinsi Bengkulu. <https://www.arcgis.com>.
- ATR/BPN. (2025). Tata Ruang Provinsi Aceh. <https://www.atrbpn.go.id>.
- Astuti, M., & Lestari, I. (2018). Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Kulonprogo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan Yogyakarta. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 18(2), 149-164.
- Azwardi (2022). Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Penerbit Institut Teknologi Kalimantan Press. Kalimantan.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Provinsi Aceh dan Provinsi Bengkulu. www.bps.com.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Definisi Kemiskinan. www.bps.com.
- BAPPENAS. (2003). Pendapatan Asli Daerah. www.bappenas.com.
- BAPPENAS. (2024). Definisi Kemiskinan. www.bappenas.com.
- Bisma, I., Gde, D., & Susanto, H. (2010). Evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2003-2007. *Ganec Swara*, 4(3), 75-86.
- Bunga, Chentika Anugra Cenia dan Sukanto, Sukanto (2021) Kemiskinan Ekstrem Dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pada Kabupaten/Kota Penghasil Minyak Dan Gas Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2021. *Undergraduate thesis*, Sriwijaya University.

- Della Yulsa, H., & Idris, I. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran Terbuka, Inflasi dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 1(4).
- Erlina, Omar Sakti Rambe dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ernita, D. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal EMT KITA*, 8(3), 937-947.
- Foster, J., Greer, J., & Thorbecke, E. (1984). *A Class of Decomposable Poverty Measures*. *Econometrica: Journal of The Econometric Society*, 761-766.
- Ghozali, I. (2018). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi Dengan Eviews 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, A. M., & Rasbin, R. (2010). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia sebelum dan setelah krisis. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 1(2), 279-312.
- Gomies, S. J., & Pattiasina, V. (2011). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Ilmiah Aset*, 13(2), 175-183.
- Gujarati, D., N. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika Terjemahan Mangunsong, R. C.* Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah* (ed. 3) Koran. Penerbit Salemba.
- Hanisah. (2024). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Brang dan Jasa Terhadap Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sekretari*, 9(1), 1-11. <https://doi.org/10.35870/jemensri.v9i1.3048>.
- Hardianto, H., Ismail, T., & Sapiri, M. (2024). Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Alokasi Anggaran dan Kapasitas Ekonomi:(Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat). *Al-Buhuts*, 20(1), 209-228.
- Ishak, J. F. (2017). Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 17(1), 55-59.

- Jannah, C. M., Wijaya, I., & Amri, M. (2024). Determinasi Belanja Operasional Dan Modal Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(4), 27-36.
- Jaelani, A. (2015). *Management Of Public Finance In Indonesia: Review Of Islamic Public Finance*. *Munich Personal RePEc Archive*.
- Jhingan, M. L. (2014). *The Economics of Development and Planning*. Vrinda Publications.
- Kepmendagri No.690 Tahun 1996. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Kumalasari, Merna. (2011). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan. Skripsi. Semarang.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan Edisi 4*. Yogyakarta: YKPN.
- Kuncoro, M. (2010). *Dasar Dasar Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ningrum, R., T., P. (2017). Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: ENGAGEMENT*.
- Lisna, V., Sinaga, B. M., Firdaus, M., & Sutomo, S. (2013). Dampak kapasitas fiskal terhadap penurunan kemiskinan: Suatu analisis simulasi kebijakan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 14(1), 1.
- Maharani, Reza Panca And Rohima, Siti (2023) Analisis Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan: Komparasi Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Lampung. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.
- Mohammed, Adam. (2015). *Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Mantsani, M dkk. (2019). Determinan Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2017. *Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam Mendukung Implementasi SDG's*.

- Marlianita, Y., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 25–35. <https://doi.org/10.35313/iarj.v1i1.2357>.
- Mahsun, Mohamad. (2011). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Andi : Yogyakarta.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Tiga)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Meinisa, Tiara And Azwardi, Azwardi (2024) *Sustainable Development Goals (Sdg's) Di Pulau Sumatera : Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Lingkungan*. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.
- Musgrave, R. A. (1959). *Taxes and the Budget*. *Challenge*, 8(2), 18-22.
- Nany, M., Pratama, D. B., Prasetyaningrum, M., & Kusumaningsih, A. U. (2022). Pengaruh Pad, Dbh, Dau, Dak Dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 22(03).
- Oates, J.F. (1995). *The Dangers off Conservation by Rural Development: A Case Study from The Forests of Nigeria*. *Oryx*, 29, 115-122. <http://dx.doi.org/10.1017/S005306030002086>.
- Pangiuk, A. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Kemiskinan di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 2(2), 44-66.
- PP No. 5 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Tentang Penyertaan Modal Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan.
- PP No.71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2): 217-240. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium>.
- Priatna, I. A. (2025). *Buku Pembangunan Daerah*. Penerbit Widina.
- Pratama, Y., C. (2014). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (Esensi)*, 10(2).
- Putri, R. H. N., & Yuliana, I. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan dengan pengangguran sebagai mediasi di Probolinggo. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(6), 2691-2700.
- Rakadewa, V. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (*Doctoral dissertation*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Rosen, Harvey S., & Ted Gayer. (2014). *Public Finance 9nd Edition*, Richar D. Irwin Inc. Singapore.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia, Indonesia.
- Sangkaen, D., Masinambow, V. A., & Engka, D. S. (2018). Analisi Pengaruh Inflasi Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(2).
- Safitri, S.E., Sugianto, & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi banten. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan (Sibatik Journal)*, 1(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.30>.
- Saptomo, T. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Investasi Publik, Pertumbuhan Investasi Swasta, dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang. Tesis MIESP-Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sari, Dinar Islami And Marissa, Feny. (2023). Pengaruh Belanja Subsidi, Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Undergraduate thesis*, Sriwijaya University.

- Sebastiana dan Herman Cahyo. (2016). *Analysis of Economic Performance as The Independence Indicators of Government in East Java Province. Review of Integrative Business and Economics Research*, 5(2), pp: 272-285.
- Sidik, Machfud. (2002). "Optimalisasi Pajak Daerah dalam Rangka meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah". Makalah dalam Acara Orasi Ilmiah dengan Tema "Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah". Bandung: STIA LAN.
- Siregar, H., & Wahyuniarti, D. (2007). Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. <http://www.brighten.or.id/brighten/index.php/component/attachments/download/18>.
- Soesilo, T.D. (2015). Penelitian Eksperimen. Griya Media.
- Sukirno, S. (2016). Teori Mikro Ekonomi Cetakan Keempat Belas. Jakarta: Rajawali pres. Sukirno, S. (2014). Ekonomi Pembangunan Edisi Kedua. Jakarta: Kencana.
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: PT.Alfabet.
- Suprijati, J., & Ratna Damayanti, S. (2021). Hasil Penelitian Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Papua. <http://repository.unitomo.ac.id/id/eprint/3231>.
- Todaro, M., P. (2014). Pembangunan Ekonomi Jilid II. Edisi Kesebelas. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Todaro, M., P., & Stephen, C., S. (2011). Pembangunan Ekonomi Jilid 1. Edisi II. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wahyuni, S. (2018). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Dalam Mendukung Pelaksanaan Daerah. Skripsi. Yogyakarta.

Wahyu, Danur Wenda, Yunisvita dan Abdul, Bashir. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Gini Dan Kemandirian Fiskal Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. *Undergraduate thesis*, Sriwijaya University.

Wibowo, E. A., & Oktivalerina, A. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia Pada 2010-2018. *Bappenas Working Papers*, 5(1), 97-119.

Widarjono, A. (2013). *Food Demand in Yogyakarta: SUSENAS 2011*. KINERJA, 17(2).

Widodo, Suparno Eko. (2018). Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Wulandari, F. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011–2020. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Jakarta.

Wulandari. (2024). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Keterbukaan Ekonomi, Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan di Pulau Sumatera (Periode Tahun 2015- 2021). Skripsi. Jakarta. Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan: Semarang.

Zaini, Achmad. (2024). Forum Program Pembangunan yang Telah Dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya. www.setda.palangkaraya.go.id.

Zulyanto, A. (2020). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Bengkulu. Tesis Program Studi Magister.